

SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAN PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI PULAU BARRANG LOMPO

Sukri Nyompa¹, Nasiah¹, Fadhillah Nurlaely Syam¹

¹Jurusan Geografi FMIPA UNM

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, dan keikutsertaan masyarakat pulau Barrang Lompo dalam program wajib belajar 9 tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Pulau Barrang Lompo dengan jumlah 1218 KK, dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 KK dengan menggunakan teknik simple random sampling dalam penentuan sampelnya.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Pulau Barrang Lompo mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dengan tingkat pendapatan Rp Rp. 1.000.000 – 2.000.000 per bulan. Tingkat pendapatan masyarakat termasuk dalam kelas menengah yang memiliki rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 4 orang dengan tingkat pengeluaran > Rp 2.000.000. tingkat pendidikan keluarga masyarakat Pulau Barrang Lompo adalah tamatan SD/Sederajat. Karena rendahnya tingkat pendidikan di Pulau tersebut diketahui keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya

Kata Kunci : Kondisi Ekonomi, Pendidikan, Wajib Belajar 9 Tahun

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga akan bermakna strategis karena dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga (Suciptawati, 2012).

Menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005), menyatakan bahwa “landasan dan asas pendidikan sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu”. Landasan tersebut salah satunya adalah landasan ekonomi pendidikan. Pada dasarnya kondisi pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Banyak faktor yang berpengaruh pada kondisi tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor keadaan masyarakat, lingkungan alam juga berpengaruh seperti jarak, lokasi, keterjangkauan tempat. Faktor sosial ekonomi orang tua dan tingkat pendapatan orang tua juga sangat mempengaruhi. Tingkat pendidikan seorang anak tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi tanpa dipengaruhi partisipasi orangtua yang menyekolahkan anaknya (Nopembri, 2007).

Menurut data dari UNESCO pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang (Muhammad. 2015). Peringkat Indonesia dalam PISA OECD tahun 2015 meningkat signifikan, sebesar 22,1 poin. Sebelumnya, berada pada peringkat 71 di tahun 2012

menjadi 64 di tahun 2015 (kemendikbud, 2016). Hasil Analisis Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas (Kemendikbud, 2015) menunjukkan jumlah anak tidak sekolah usia 7-15 tahun telah mengalami penurunan dari 2,52 juta atau 6% dari populasi pada 2009 menjadi 1,99 juta atau 4,6% dari populasi pada 2012

Ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu penopang dari keberhasilan proses pendidikan. Tanpa kemampuan ekonomi maka akan sulit seseorang mendapatkan layanan pendidikan unggul dan berkualitas. Jadi pada intinya dapat ditarik benang merah bahwa ekonomi merupakan daya dukung utama keberhasilan proses pendidikan (Arifin, 2015). Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diturunkan kepada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (Tusukan, 2016).

Kota Makassar Sulawesi Selatan, pelaksanaan pendidikan bebas biaya yang saat ini masih berjalan dinilai belum sepenuhnya berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi di beberapa sekolah negeri. Terlebih di beberapa sekolah swasta dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tidak lengkap yang berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar (Ismail, 2014).

Pulau Barrang lompo merupakan sebuah pulau yang memiliki sarana pendidikan yang dapat dikatakan memadai dimana terdapat play group dan TK dengan tenaga pengajar

berjumlah 2 dan 5 orang, sedangkan tingkat SD terdapat 2 buah bangunan dengan tenaga pengajar berjumlah 22 orang, SMP dengan tenaga pengajar 13 orang serta terdapat bangunan SMA dengan tenaga pengajar berjumlah 13 orang, tetapi walaupun memiliki sarana pendidikan yang cukup masih ditemukan beberapa hal yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan atau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang masih kurang diindahkan salah satunya yaitu faktor ekonomi. Walaupun dikatakan pendidikan gratis tetapi faktor ekonomi memiliki peranan yang cukup besar dalam pelaksanaan pendidikan, dimana terdapat anak yang tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan memiliki perekonomian yang rendah ditemukan pula anak yang memiliki tingkat perekonomian yang baik tetapi berpendidikan rendah. Pulau Barrang Lompo juga terkenal dengan hasil lautnya yang kaya akan terumbu karang dan dominan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan hal ini termasuk sebagai salah satu penyebab banyaknya anak putus sekolah karena lebih memilih ikut berlayar bersama orang tuanya untuk mencari nafkah daripada mengikuti pelajaran dikelas, atas dasar tersebut peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **“Sosial Ekonomi Keluarga dan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kondisi ekonomi keluarga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar? (2) Bagaimana tingkat pendidikan keluarga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar? (3) Bagaimana keikutsertaan masyarakat Pulau Barrang Lompo dalam program wajib belajar 9 tahun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kondisi ekonomi keluarga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar (2) Mengetahui tingkat pendidikan keluarga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, (3) Mengetahui keikutsertaan masyarakat Pulau Barrang Lompo dalam program wajib belajar 9 tahun

2. Metode Penelitian

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dengan fokus penelitian adalah kondisi sosial ekonomi keluarga dan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di pulau Barrang Lompo Kota Makassar dengan jumlah 1218 kepala keluarga yang terdiri dari 4

RW, (RW 1) 255 KK, (RW 2) 299 KK, (RW 3) 381 KK, dan (RW 4) 283 KK (Profil Kelurahan, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah 92 KK yang diperoleh dengan menggunakan teknik proportional random sampling

2.3 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah: (1) Kondisi Ekonomi seperti Jenis Pekerjaan, Besar Pendapatan, Tingkat Pengeluaran, Jumlah tanggungan. (2) Kondisi Sosial yaitu Tingkat Pendidikan

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan juga data sekunder, data primer dikumpulkan dengan menggunakan: (1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai situasi dan kondisi dilapangan mengenai objek yang akan diteliti seperti keseharian masyarakat pulau Barrang lompo.(2) Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi dari informan secara mendalam mengenai perekonomian keluarga dan program wajib belajar 9 tahun. (3) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dimana dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013). Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini diperoleh melalui penelusuran atau studi kepustakaan seperti artikel-artikel, jurnal, buku, dan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan kajian penelitian

2.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan yang diteliti serta memaparkan data dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Seperti kondisi perekonomian keluarga yang ada di Pulau Barrang Lompo yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentasenya, serta tingkat pendidikan sehingga diketahui pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara Astronomis Pulau Barrang Lompo terletak pada $119^{\circ} 19' 38''$ - $119^{\circ} 19' 54''$ BT dan $5^{\circ} 2' 44''$ - $5^{\circ} 3' 5''$ LS dan secara geografis Pulau Barrang Lompo sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Badi, sebelah Timur berbatasan dengan kota Makassar, sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Barrang Caddi dan sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Bone Tambung. Jarak dari kota Makassar 13 km sedangkan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 30 menit melalui jalur laut, Pulau Barrang Lompo merupakan salah satu dari delapan pulau yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang dulunya termasuk kedalam kecamatan Ujung Tanah tetapi pada akhir Desember tahun 2016 terjadi pemekaran Kecamatan, delapan pulau yang termasuk kedalam wilayah Pemekaran kecamatan ini yaitu Pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, Bone Tambung, Lumu-lumu, Langkai, Lanjukang,

Kodingareng Keke, dan kodingareng. Pulau Barrang Lompo merupakan ibu kota kecamatan kepulauan Sangkarrang pulau ini terkenal dengan penduduk terpadat diantara pulau-pulau yang termasuk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 4.744 jiwa dimana jumlah laki-laki 2.354 jiwa dan perempuan berjumlah 2.390 jiwa, selain itu pulau ini kaya akan sumber daya laut seperti terumbu karang sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung

1. Kondisi Ekonomi Keluarga

a. Pekerjaan pokok kepala keluarga

Data tentang pekerjaan pokok kepala keluarga berdasarkan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 92 jumlah responden maka diperoleh jenis pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Pulau Barrang Lompo

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Nelayan	70	76.09
2	Wiraswasta	9	9.79
3	Pedagang	7	7.61
4	Pengrajin	2	2.17
5	Tukang kayu	2	2.17
6	PNS	2	2.17
Jumlah		92	100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Tahun 2017

Tabel tersebut menggambarkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat pulau Barrang Lompo dominan sebagai seorang nelayan dengan hasil persentase terbanyak 76.09 persen. Nelayan di Pulau Barrang lompo terbagi menjadi 3 yaitu nelayan harian, nelayan mingguan, dan nelayan teripang sedangkan pekerjaan seperti PNS, tukang kayu, pengrajin adalah pekerjaan yang sangat minim ditemukan dengan persentase terendah yaitu 2.17 persen.

b. Besar Pendapatan

Besar pendapatan masyarakat Pulau Barrang Lompo dibagi mejadi tiga kelas yaitu tipe kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah

Tabel 4.2 Besar Pendapatan Masyarakat Pulau Barrang Lompo

No	Besar Pendapatan (per bulan)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rp 0 – 500.000	15	16.30
2	Rp 500.100 – 1.000.000	25	27.18
3	Rp 1. 000. 100 – 1.500.000	16	17.39
4	Rp 1. 500. 001 – 2. 000. 000	14	15.21
5	> Rp 2. 000. 000	22	23.92
Jumlah		92	100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Tahun 2017

Besar pendapatan masyarakat Pulau Barrang Lompo dengan frekuensi tertinggi adalah 27.18 persen dengan besar

pendapatan Rp 500.000 – 1.000.000 penghasilan ini termasuk dalam kelas bawah, sedangkan besar pendapatan dengan frekuensi terendah adalah 15.21 persen dengan besar pendapatan Rp. 1.500.000 – 2.000.000, dengan diketahuinya tingkat pendapatan masyarakat diketahui bahwa golongan kelas dengan persentasi 23.92 persen dengan besar pendapatan > Rp 2.000.000, sedangkan golongan kelas menengah memiliki persentase 48.91 persen dengan besar pendapatan Rp. 1.000.000 – 2.000.000 dan golongan kelas bawah memiliki persentase 16.30 persen dengan besar pendapatan < Rp 1.000.000, kelas golongan atas rata-rata bekerja sebagai nelayan, wiraswasta, dan pedagang. Dari hasil wawancara dengan 92 responden diketahui bahwa 12 KK memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai kuli bangunan berjumlah 3 KK rata-rata pedapatan yang dihasilkan Rp 100.000 per hari, pedagang kecil-kecilan 4 KK dengan jumlah penghasilan Rp 2.000.000 – 5.000.000 per bulan, pengrajin 1 KK penghasilan yang didapatkan adalah Rp 50.000 per minggu, pekerja teripang sebanyak 4 KK dengan penghasilan yang didapatkan Rp 700.000 dari mengerjakan teripang, pengeringan sampai proses penjualan teripang.

c. Tingkat Pengeluaran

Pengeluaran yang dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga perbulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Tingkat Pengeluaran Masyarakat Pulau Barrang Lompo

No	Tingkat Pengeluaran (Rupiah)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rp 0 - 500.000	14	15.22
2	Rp. 500.100– 1.000.000	21	22.83
3	Rp 1. 000. 100 – 2.000. 000	27	29.31
4	> Rp 2. 000. 000	30	32.60
Jumlah		92	100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Tahun 2017

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran lebih besar daripada tingkat pendapatan hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus terpenuhi sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia di Pulau Barrang Lompo masih terbilang kurang sedangkan semua kebutuhan seperti beras, pakaian, dan yang lainnya memiliki harga yang melonjak di Pasaran. Walaupun diketahui bahwa bekerja sebagai seorang nelayan meiliki pendapatan yang begitu besar tetapi waktu melaut yang di perhitungkan dengan tingkat pendapatan sangat jauh berbeda karena pada saat nelayan teripang melaut selama kurang lebih tiga bulan maka yang ditinggalkan adalah utang piutang bagi keluarganya

d. Jumlah Tanggungan

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sebuah keluarga untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Tanggungan Keluarga Masyarakat Pulau Barrang Lompo

No	Jumlah anggota keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1	2	21	22.83
2	3	18	19.56
3	4	24	26.08
4	5	15	16.30
5	6	9	9.79
6	≥7	5	5.44
Jumlah		92	100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggungan keluarga masyarakat Pulau Barrang Lompo yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari 92 jumlah responden diketahui bahwa rata-rata dalam satu kepala keluarga terdapat 26.08 persen atau 4 orang anggota keluarga, dan didapatkan beberapa dalam satu kepala keluarga terdapat 7 atau lebih anggota keluarga persentase sebanyak sebanyak 5.44 persen.

2. Pendidikan Keluarga

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia pada tabel dibawah ini menunjukkan pendidikan masyarakat Pulau Barrang Lompo.

a. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan berdasarkan tanggapan responden dengan jumlah 92 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Pendidikan responden Masyarakat Pulau Barrang Lompo

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	7	7.60
2	Tamat SD/Sederajat	69	75
3	SMP/Sederajat	8	8.70
4	SMA/Sederajat	8	8.70
5	Perguruan Tinggi	0	0
Jumlah		92	100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh responden paling banyak berada pada tingkat SD/Sederajat yaitu 75 persen dan tidak ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, dan hal ini sangat mempengaruhi pendidikan anggota keluarganya

b. Pendidikan Anggota Keluarga

Tingkat pendidikan anggota keluarga berdasarkan tanggapan responden dengan jumlah 92 responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Pendidikan Anggota Keluarga Masyarakat Pulau Barrang Lompo

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
----	--------------------	-----------	----------------

1	Belum Sekolah	20	6.15
2	Tidak Tamat SD	24	7.39
3	SD/Sederajat	197	60.62
5	SMP/Sederajat	43	13.23
6	SMA/Sederajat	28	8.61
7	Perguruan Tinggi	13	4
Jumlah		325	100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan anggota keluarga yang telah ditempuh, dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa frekuensi tertinggi dari tingkat pendidikan anggota keluarga adalah SD/Sederajat dengan persentase 60.62 persen dan paling rendah adalah Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 4 persen. Tingkat pendidikan anggota keluarga tidak jauh berbeda dengan tingkat pendidikan orang tua, walaupun orang tua ingin melihat anaknya melaksanakan pendidikan yang lebih dari mereka tetapi lingkungan sangat memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga anak-anak mereka tidak semuanya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

3. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun

Data tentang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dilihat dari pendidikan terakhir yang diikuti maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.7 Pelaksanaan Program wajib Belajar 9 tahun Masyarakat Pulau Barrang Lompo

No	Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1	Belum Melaksanakan	20	8.31
2	Tidak Tuntas	114	47.30
3	Sedang Melaksanakan	68	28.21
4	Telah Melaksanakan	39	16.18
Jumlah		241	100

Sumber : Hasil olahan data kuesioner Tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Pulau Barrang Lompo tidak terlaksana dengan baik dilihat dari pendidikan terakhir yang memiliki frekuensi tertinggi adalah SD/Sederajat dengan persentase 53.52 persen dan anak yang tidak menuntaskan program wajib belajar 9 tahun sebanyak 47.30 persen dan yang melaksanakan program tersebut hanya 28.21 persen. Program wajib belajar 9 tahun merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar dan telah ditetapkan untuk semua anak yang berusia 7 – 15 tahun tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pendidikan masih sangat kurang dan lebih membutuhkan pengarahannya mengenai pentingnya melaksanakan pendidikan. program pemerintah dinilai sangat bagus dimata masyarakat Pulau dikarenakan telah dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk semua masyarakat dalam usia 7 – 15

tahun yang mengikuti program wajib belajar 9 tahun dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini anak-anak diberikan bantuan oleh pemerintah agar dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan sekolah anak sehingga tidak ada lagi kata putus sekolah bagi kalangan anak-anak. Walaupun pemerintah telah memfasilitasi masyarakat tetapi beberapa anak masih tidak betah disekolah karena beberapa hal yaitu faktor lingkungan, anak-anak di Pulau Barrang Lompo sangat terpengaruh oleh lingkungan dikarenakan orang tuanya adalah nelayan yang setiap hari melaut sehingga anak juga ingin melaut bersama orang tuanya, lingkungan tempat anak bermain juga sangat mempengaruhi keinginan bersekolah, jika anak bergaul dengan orang-orang yang tidak bersekolah maka mereka juga tidak ingin mengikuti pelajaran disekolah karena lebih memilih bergaul dengan teman-temannya. Faktor kedua adalah ekonomi, beberapa anak berhenti dari bangku sekolah dikarenakan ingin membantu perekonomian keluarganya, disamping itu ekonomi sangat berperan penting dalam melaksanakan pendidikan. Hasil analisis data ditemukan beberapa anak yang memiliki perekonomian yang baik tetapi tidak melanjutkan sekolahnya sedangkan anak dengan ekonomi yang rendah tetap melanjutkan sekolahnya. Faktor yang ketiga adalah orang tua, beberapa orang tua tidak mengizinkan anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah tamat dari bangku SD/Sederajat dengan anggapan pendidikan tidak akan mengubah kehidupan perekonomian walaupun melaksanakan pendidikan dan lebih baik mencari nafkah dilaut daripada bersusah-susah dalam bersekolah, hal inilah yang membuat anak-anak tidak mengikuti program yang telah

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Kondisi ekonomi keluarga masyarakat Pulau Barrang Lompo dilihat dari jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan jumlah tanggungan diketahui bahwa masyarakat Pulau mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dengan persentase 76.08 persen jenis pekerjaan tukang kayu, pengrajin dan PNS adalah pekerjaan yang memiliki frekuensi terendah yaitu 2.17 persen. Besar pendapatan masyarakat pulau termasuk dalam golongan kelas menengah dengan tingkat pendapatan Rp. 1.000.000 – 2.000.000 per bulan. Tingkat pengeluaran sangat bergantung terhadap besarnya kebutuhan, tingkat pengeluaran tertinggi yaitu 32.60 persen, dengan tingkat pengeluaran > Rp 2.000.000. sedangkan frekuensi jumlah tanggungan tertinggi adalah 22.08 persen dengan beban tanggungan 4 orang sedangkan frekuensi terendah adalah 5.43 persen dengan jumlah tanggungan \geq 7 orang. (2) Tingkat pendidikan merupakan aspek sosial yang memiliki peranan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diketahui bahwa frekuensi tingkat pendidikan tertinggi responden di Pulau Barrang

Lompo adalah Tamat SD/Sederajat dengan persentase 75 persen sedangkan frekuensi tingkat pendidikan terendah orang tua adalah perguruan tinggi karena tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi. Pendidikan anggota keluarga SD/Sederajat dengan frekuensi 60.62 persen, dan terendah anggota keluarga yang mengikuti perguruan tinggi sebanyak 4 persen. (3) Keikutsertaan masyarakat Pulau dalam melaksanakan program wajib belajar yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dikatakan bahwa tidak semua masyarakat melaksanakan program tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi keluarga, dan faktor orang tua.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi saran peneliti ialah : (1) Untuk peneliti lanjutan, dapat melakukan pendekatan yang lebih kepada masyarakat sehingga informasi yang diperoleh lebih dalam, (2) Untuk masyarakat, semoga siring dengan berjalannya waktu paradigme mengenai pendidikan dapat berubah sehingga lebih memprioritaskan pendidikan anak-anak, (3) Untuk pemerintah, program yang telah dilaksanakan sangat bermanfaat tetapi perlu pengawasan lebih teruntut kepada pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan sangat berguna bagi kelangsungan hidup agar tercipta bibit yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2015. *Relasi Ekonomi dan Pendidikan*. Jurnal ekonmi pendidikan diakses pada tanggal 17 November 2016
- Ismail, 2014. *Analisis Arah Kebijakan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan taun yang Merata dan Berkualitas Di Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial UNM
- Kemendikbud, 2016. *Peringkat Dan Pencapaian Indonesia Mengalami Loncatan Yang Cukup Tinggi*. InfoKEMENDIKBUD.com Diakses tanggal 9 Maret 2017
- Muhammad. 2015. *Kualitas Pendidikan Indonesia di Mata Dunia*. Kualitas pendidikan dimata dunia.html. Diakses Tanggal 9 Maret 2016
- Nopembri. Gigih. 2007. *Faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah di desa sendang kecamatan wonogiri kabupaten wonogiri*. Universitas Negeri Semarang
- Badan Pusat Statistik Makassar. *Makassar Dalam Angka 2016*. Kota Makassar
- Suciptawati, dkk, 2012. *Tanggapan Masyarakat Desa Terpencil Terhadap Wajib Belajar 9 Tahun*. PIRAMIDA Vol. VIII No. 1 : 32 – 38
- Tirtarahrdja, U & Sulo La, S, L. 2005. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tusukan, Janto H. 2016. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib 9 Tahun Di Kabupaten Minahasa Utara*. FSIP UNSRAT

